

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang sangat luas, pemerintah Indonesia tentunya harus memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yakni kegiatan memberikan berbagai pelayanan umum maupun fasilitas sosial kepada masyarakat seperti penyediaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pemerintah pusat telah melakukan pendelegasian wewenang dan kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri yang dikenal dengan istilah otonomi. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan buah gerakan reformasi yang melahirkan demokratisasi di negeri ini. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang secara efektif dimulai pada Januari 2001.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini harapannya mampu memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan mendasar tersebut yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga

politik. Perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayanan publik seharusnya dapat mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan layanan publik tingkat lokal, serta sesuai dengan asas demokrasi (Rochjadi, 2006:16).

Kebijakan desentralisasi memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu untuk menghilangkan kesenjangan (*imbalances*) yang ada, baik kesenjangan vertikal (*Vertical Imbalance*) antara pusat dan daerah maupun kesenjangan horizontal (*horizontal imbalance*) antar daerah di Indonesia. Desentralisasi juga dimaksudkan untuk menciptakan demokratisasi di Indonesia, sehingga kekuasaan tidak terpusat di satu tempat. Desentralisasi juga diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena jarak antara yang melayani (pemerintah daerah) dan yang dilayani (rakyat) semakin dekat. Selain itu desentralisasi juga diharapkan akan mampu menciptakan efek penyebaran daerah atau *interjurisdictional spillover effect*),(Syahrir Ika, dkk, 2013;178).

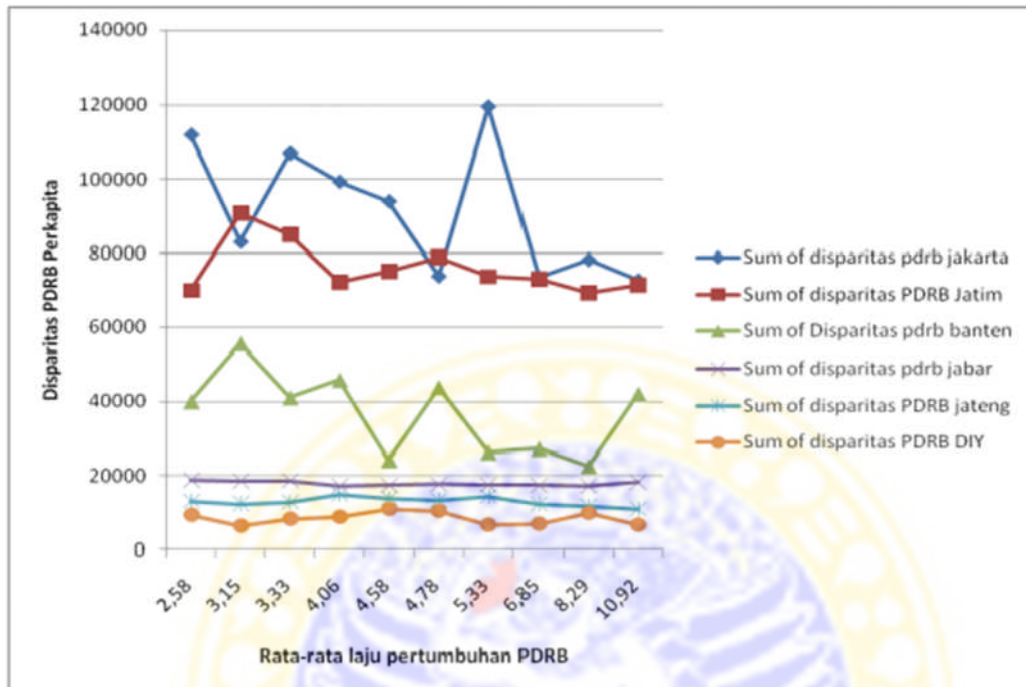
Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan regional. Ketimpangan pendapatan antara regional seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang cukup cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Masing-masing daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki tiap daerah. Berikut dapat kita lihat Indeks Gini menurut Provinsi di Pulau Jawa:

**Tabel 1.1****Indeks Gini Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2003 sampai 2012**

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>DKI Jakarta</b>	0,31	0,36	0,30	0,36	0,34	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42
<b>Jawa Barat</b>	-	-	0,34	-	0,34	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41
<b>Banten</b>	-	-	0,36	-	0,37	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39
<b>Jawa Tengah</b>	0,25	0,25	0,31	0,27	0,33	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38
<b>DI Yogyakarta</b>	0,34	0,37	0,41	0,37	0,37	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43
<b>Jawa Timur</b>	-	-	0,36	-	0,34	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, Indonesia 2012<sup>a</sup>

Berdasarkan Tabel 1.1 tingkat ketimpangan ini diukur dengan rasio gini, suatu rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2012 indeks gini tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tahun 2003 mencapai angka 0,34 kemudian meningkat pada tahun 2012 mencapai angka yang tinggi ketimpangan ini mencapai angka 0,43. Indeks gini pada Provinsi Daerah Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang mencerminkan angka ketimpangan yang tinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu dapat juga kita bandingkan hubungan laju pertumbuhan dengan disparitas PDRB Perkapita antar Provinsi di Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 pada halaman 4 berikut ini :



Sumber :Badan Pusat Statistik Indonesia 2012<sup>b</sup>

**Gambar 1.1**  
**Disparitas PDRB Per kapita dan laju pertumbuhan PDRB**  
**menurut Provinsi di Pulau Jawa**

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa yang menempati disparitas PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan disparitas PDRB per kapita mencapai angka 120000, kemudian Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan yang terendah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai angka di bawah 20000. Terdapat perbedaan antara disparitas PDRB per kapita dengan indeks gini. Menurut indeks gini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai gini tertinggi dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, menurut ketimpangan

pendapatan per kapita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi terendah, hal tersebut terjadi karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Kabupaten/Kota paling sedikit. Selain itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan sesuai dengan UU No 13 Tahun 2012 meliputi tata cara pengisian jabatan kedudukan tugas dan wewenang wakil gubernur dan gubernur, kelembagaan pemerintah provinsi, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, yang berbeda dengan Provinsi-provinsi lainnya yang berada di pulau Jawa. Berdasarkan alasan tersebut saya menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit observasi.

Koefisien gini digunakan untuk mengukur ketimpangan di level nasional, dalam penelitian ini ketimpangan pendapatan regional akan di ukur dengan Indeks Williamson, Indeks Williamson mempunyai keunggulan dibandingkan dengan ukuran lain, karena diberi bobot dengan proporsi jumlah penduduk dari masing-masing daerah terhadap total penduduk. Ukuran ini sesuai dengan koefisien dari variasi yang mana standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati nol maka pembangunan ekonomi antar daerah semakin merata, sebaliknya jika mendekati satu maka pembangunan ekonomi antar daerah semakin tidak merata

Hampir di semua daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perekonomian cenderung meningkat dilihat dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan Tabel 1.3 pada halaman 8, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah. Menurut BPS (2013), yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan



pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu dari indikator sosial tenaga kerja.

**Tabel 1.2**

**Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012**

Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja
DKI Jakarta	3.838.596
Jawa Barat	18.321.108
Banten	4.605.847
Jawa Tengah	16.132.890
D.I Yogyakarta	1.867.708
Jawa Timur	19.081.905

Sumber : BPS, Statistika Indonesia, 2012<sup>c</sup>

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki tenaga kerja yang paling besar pada tahun 2012. Kemudian Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan yang memiliki jumlah tenaga kerja yang paling kecil pada tahun 2012 adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah di samping sebagai provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali, akan terlihat *originalitas* atau keaslian keutuhan wilayah kabupaten/kota sejak otonomi daerah diberlakukan mulai 1 Januari 2000. Mengingat pemekaran wilayah setelah lebih dari 10 tahun berjalan belum terbukti harapan masyarakat di daerah hasil pemekaran wilayah menjadi lebih sejahtera karena banyaknya kasus korupsi, penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas

Hukum UGM tahun 2009 menemukan, dalam lima tahun terakhir, sekitar 1.891 kasus korupsi di tujuh daerah pemekaran baru, korupsi itu terjadi di Provinsi Banten (593) kasus, Kepulauan Riau (463), Maluku Utara (184), Kepulauan Bangka Belitung (173), Sulawesi Barat (168), Gorontalo (155), dan Papua Barat 147 kasus yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Kompas, 2 Agustus 2010) .

Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km<sup>2</sup>, meliputi 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap Kabupaten/Kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah. Pendapatan dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi meliputi : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan dan penerimaan lainnya. Komponen-komponen yang ada pada sisi penerimaan total ini sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap kondisi makro ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pemerataan hasil pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro (2006), tujuan utama dari pembangunan

ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan regional dan tingkat pengangguran, dengan adanya kesempatan kerja bagi penduduk dan masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui PDRB dan PDRB per kapita. Berikut ini rincian tabel Laju PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar harga konstan 2000 Tahun 2003-2012 (%):

**Tabel 1.3**

**Laju Pertumbuhan PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah**

Kab/Kota di DIY	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Kulon Progo	4,19%	4,49%	4,77%	4,05%	4,12%	4,71%	3,97%	3,06%	4,95%	5,01%
Kab.Bantul	4,69%	5,04%	4,99%	2,02%	4,52%	4,90%	4,47%	4,97%	5,27%	5,34%
Kab.Gunung Kidul	3,36%	3,43%	4,33%	3,82%	3,91%	4,39%	4,14%	4,15%	4,33%	4,84%
Kab. Sleman	5,08%	5,25%	5,03%	4,50%	4,61%	5,13%	4,48%	4,49%	5,19%	5,45%
Kota Yogyakarta	4,76%	5,05%	4,50%	3,97%	4,46%	5,12%	4,46%	4,98%	5,64%	5,76%
DIY	4,58%	5,12%	4,73%	3,70%	4,31%	5,03%	4,43%	4,88%	5,16%	5,32%

**Istimewa Yogyakarta atas dasar harga konstan 2000 Tahun 2003-2012 (%)**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta dalam angka 2012<sup>a</sup>

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari ke 5 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang berada diatas rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan, yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB terendah rata-rata laju pertumbuhan



PDRB Provinsi adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh Kabupaten Sleman sementara Kabupaten Gunung Kidul mengalami pertumbuhan terendah.

PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tertentu. Menurut BPS (2013), PDRB Per kapita adalah total PDRB suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita di suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya semakin rendah tingkat PDRB per kapita di suatu wilayah maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berikut ini PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar harga konstan Tahun 2003-2012 (Rupiah) :

**Tabel 1.4**

**PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar harga konstan 2000 Tahun 2003-2012 (Rupiah)**

No	Tahun	Kabupaten/Kota				
		Kulonprogo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
1	2003	3.616.313	3.627.281	3.736.926	4.878.095	10.175.589
2	2004	3.747.449	3.640.936	3.846.283	4.977.241	9.815.114
3	2005	3.920.798	3.747.763	4.000.254	5.131.220	10.109.338
4	2006	4.075.586	3.732.268	4.141.652	5.240.006	10.269.336
5	2007	4.239.955	3.845.008	4.292.535	5.408.803	10.587.919
6	2008	4.435.553	3.976.712	4.470.621	5.612.511	10.989.241
7	2009	4.609.219	4.203.156	4.733.514	5.675.733	13.459.208
8	2010	4.580.532	4.353.170	4.930.661	5.830.337	14.167.677
9	2011	4.790.630	4.534.212	5.124.333	6.054.435	14.893.159
10	2012	4.992.180	4.741.941	5.319.628	6.341.065	15.612.923

Sumber : Badan Pusat Statistik, PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta 2012<sup>b</sup>

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan adanya perbedaan PDRB per kapita yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut terlihat dari PDRB per kapita yang mendominasi adalah Kota Yogyakarta, pada tahun 2012 mencapai 15.612.923. Kemudian pada posisi kedua terbesar adalah Kabupaten Sleman dengan angka 6.341.065 pada tahun 2012. Sedangkan, kabupaten lainnya PDRB per kapitanya jauh lebih rendah dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari beberapa daerah yang diatur dengan otonomi khusus atau bersifat sebagai daerah istimewa. Karena kedudukannya yang khusus, daerah-daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang tersendiri, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Yogyakarta secara sah diakui sebagai daerah istimewa. Proses penetapan UU tersebut telah memakan waktu yang lama, yaitu sejak tahun 2007 s.d 2012. Salah satu hal yang menjadi fokus telaan dalam konteks desentralisasi ialah masalah keistimewaan. Beberapa kalangan melihat bahwa implementasi otonomi daerah banyak menegaskan kekhususan suatu daerah/wilayah. Padahal Indonesia ditandai dengan keberagaman dalam berbagai aspek, baik dari sudut sosio-kultural maupun politik-ekonomi.

Menurut Khasanah (2007), analisis terhadap rasio keuangan pada APBD di Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan proporsi secara statistik (rasio keuangan daerah atau RKKD) Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005. Artinya, pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Disamping itu, ketergantungan Kabupaten Sleman dan Bantul terhadap sumber dana pusat semakin menurun. Besarnya proporsi anggaran untuk belanja pembangunan pada tahun 2005 (tahun dilaksanakannya pilihan kepala daerah langsung) mengalami peningkatan pada tahun 2004.

Sesuai dengan pendapat Rasyid (2000:88) yang menyebutkan bahwa, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Fakta lain yang disajikan secara empiris oleh Brodjonegoro & Asanuma (2000 ; 120) yang menyatakan bahwa selain daripada pengaruh desentralisasi yang di jelaskan sebelumnya, pengaruh lainnya, desentralisasi bukannya mempersempit jarak ketimpangan namun justru memperlebarnya sehingga hasil penelitian tersebut membuktikan pendapatan perkapita rill provinsi dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lessman (2006) dan Widhiyanto (2008) menemukan bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi negatif terhadap disparitas pendapatan antar regional. Sebaliknya Boinet, J (2006) justru menyimpulkan dari hasil penelitian mereka bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi positif atau akan

meningkatkan disparitas pendapatan. Tampak bahwa terdapat berbagai perbedaan kesimpulan tentang dampak dari variabel desentralisasi pengeluaran terhadap disparitas pendapatan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boinet, J (2006) yang menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan di Kolombia dengan kesimpulan yang selaras dengan penelitian yang dilakukan Woller dan Phillips (1998). Penelitian Boinet, J menemukan bukti yang kuat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal meningkat di tiap daerah, namun disparitas pendapatan antar wilayah juga akan meningkat selama periode yang dianalisis tersebut. Hal itu menurut Boinet, J disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain alokasi sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang cenderung lebih besar terhadap pengeluaran rutin (upah atau gaji) dibanding terhadap investasi untuk infrastruktur atau permodalan di daerah. Faktor berikutnya adalah kurangnya kapasitas kelembagaan (*institusi*) pada pemerintah daerah, tidak adanya insentif yang cukup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan kurangnya redistribusi transfer nasional (pusat).

Dalam studi ini, pertumbuhan ekonomi yang ingin di capai oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian pembangunan manusia. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Indikator yang digunakan dalam pencapaian pembangunan tersebut dilihat dari



kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan. Hal itu dapat kita lihat pada Tabel 1.5 berikut ini :

**Tabel 1.5**  
**Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 – 2012**

Kab/Kota di DIY	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Kulon Progo	70,42	70,92	71,50	72,01	74,15	74,88	75,23	75,77	75,04	75,33
Kab. Bantul	71,11	71,51	71,95	71,97	72,78	73,38	73,75	74,53	75,05	75,51
Kab. Gunung Kidul	68,46	68,86	69,27	69,44	69,68	70,00	70,10	70,45	70,84	71,11
Kab. Sleman	74,72	75,11	75,57	76,22	76,70	72,24	77,70	78,20	78,79	79,39
Kota Yogyakarta	77,18	77,42	77,70	77,81	69,68	78,95	79,29	79,52	79,89	80,24
DIY	72,41	72,91	73,50	73,70	74,15	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75

Sumber : BPS, Data Makro Sosial Ekonomi DIY 2003 – 2012<sup>c</sup>, diolah

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas menunjukkan, pada tahun 2003 – 2012, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilihat berdasarkan pengelompokkannya IPM kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati kelompok dengan tingkat pembangunan manusia menengah dengan nilai IPM berkisar antara 50,00 sampai dengan 79,00. Fenomena yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta angka harapan hidupnya tinggi karena pendidikan tinggi meskipun tingkat pendapatannya rendah dan mengakibatkan angka kemiskinan relatif tinggi.



Dilihat dari variabel-variabel makro ekonomi dan sosial, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal belum mampu mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, masalah ketimpangan pendapatan regional antar daerah yang tinggi, serta besarnya jumlah pengangguran dalam penyerapan tenaga kerja, rendahnya pendapatan masyarakat dan kinerja pembangunan manusia belum optimal, sehingga proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan tidak tercapai. Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh studi tentang **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Regional Serta Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan regional di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Apakah Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan regional secara bersama-sama dan parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

4. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan regional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menguji dan menganalisis Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan regional antar daerah secara bersama-sama dan parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menguji dan menganalisis penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari studi ini adalah :

1. Kontribusi pengembangan ilmu atau teori yang berkaitan dengan analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan regional serta penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Masukan bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengambil kebijakan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan regional dan penyerapan tenaga kerja untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sebagai referensi dan bahan pembanding bagi penelitian berikutnya yang terkait dengan masalah desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan regional dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

